DAFTAR PUSTAKA

- Al- Quran Al Karim
- Apriyanti, Hani Werdi. *Teori Akuntansi Berdasarkan Pendekatan Syariah*. Yogyakarta: Deepublish. 2018.
- Badudu J.S dan Sutan Mohammad Zain.1994. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Bugin, Burhan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.2004.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2013.
- Gunawan, Imam. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT Bumi Aksara. 2016.
- Halim, Abdul dan Syam Kusufi. 2013. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat.
- Harahap ,Sri Belia. *Strategi Penerapan Metode Ummi dalam Pembelajaran Al-Quran*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka. 2020.
- Ikhsan, Arfan. Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2008.
- Kasiram, Moh. Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif. Malang: UIN Maliki Press. 2010.
- Mardiasmo. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi. 2002.
- Moleong, J. Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.2012.
- Moleong ,Lexy J. Metode Penelitian Kualitatif.Bandung: Remaja Rosdakarya. 2006.
- Mursyidi. Akuntansi Dasar. Bogor: Ghalia Indonesia. 2010.
- Mursyidi. *Akuntansi Pemerintahan di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama. 2009.
- Nugroho, Riant. Kebijakan Publik. Jakarta: Alex Media Komputindo. 2003.
- Pamawi, Afi. Penelitian Tindakan Kelas. Yogyakarta: Deepublish. 2020.
- Priyati ,Novy. Pengantar Akuntansi. Jakarta: PT Indeks. 2016.

- Siregar ,Syofian. Statistika Deskriptif untuk Penelitian Dilengkapi Perhitungan Manual dan Aplikasi SPSS. Jakarta: Rajawali Perss. 2010.
- Sjamsuddin, Sjamsiar. Etika Birokrasi dan Akuntabilitas Pemerintahan. Malang: Intrans Publishing. 2017.
- Sugiono. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Alfabeta. 2010.
- Suwanda, Dadang.. Reviu Laporan Kuangan Pemerintah Daerah. Bansung: Remaja Rodaskarya. 2017
- Tahir, Arifin. Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggraan Pemerintah Daerah. Bandung: Alfabeta. 2014.
- Aditia, Dito. "Analisis Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah." *Universitas Pembangunan Panca Budi* 2, No.3 (2018)
- Armaini,Rosy. "Asas-Asas Pengelolaan Keuangan Desa dalam Pencapaian Akuntabilitas Penggunaan Dana Desa di Desa Karang Agung." *Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Sriwijaya* 1 No.1 (2017)
- Astuti, An Rass Try. "Manajemen Organisasi (Teori dan Kasus)." IAIN Parepare Nusantara Press (2019)
- Auditya, Lucy. "Auditya, "Analisis Pengaruh Akuntabiliatas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah." *Jurusan Akuntansi Universitas Bengkulu* 3, No.1 (2013)
- Hanifah Suci Indah. "Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa." *Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia*Surabaya 4, No.8 (2015)
- Istiqamah, Novya Nurul. "Analisis Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi masyarakat dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa terhadap Kinerja Pemerintah Desa di Kabupaten Ngawi." *Universitas Brawijaya* (2017)
- Kurnia, Rahmi, Nurzi Sebrina dan Halmawati. "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa." *Universitas Negeri Padang* 1, No.1 (2019)
- Marini, Onsardi dan Ezizia Selvia. "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dalam Perspektif Islam." *Universitas Muhammadiyah Bengkulu* 4, No.3 (2020)

- Napisah, Lilis Saldah. "Model Pengelolaan Dana Desa Melalui Prinsip Akuntabilitas Publik dan Transparansi di Kabupaten Bandung." (STIE Ekuitas Bandung 6 No.2 (2020)
- Ramadanis dan Muhammad Ahyaruddin. "Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa." *Universitas Muhammadiyah Riau* 9, No.1 (2019)
- Rusmanto. "Pengaruh Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan Terhadap Penggunaannya dalam Pengambilan Keputusan." *STIEN Banjarmasin* 12 No.1 (2008)
- Pratama, Bima Cinintya,Inta Gina Setiawini, dan Siti Fatimah. "Penerapan Prakktik dan Teori Akuntansi Syariah Berdasarkan Prinsip Syariah." *Universitas Muhammadiyah Purwokerto* 13 No.2 (2017)
- Sari ,Nurma. "Akuntansi Syariah." IAIN Pontianak 4 No. 1 (2014)
- Widilestariningtyas, Ony dan Irvan Permana."Implementasi Transparansi dan Akuntabilitas dalam Upaya Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah." *Universitas Komputer Indonesia* 10 No.1 (2011)
- Gunawan, Dimas Rizky. "Penerapan Sistem E-Budgeting Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Publik." *Jurnal Akuntansi* 8 No.1 (2016)
- Riswan dan Yolanda Fetrecia Kesuma. "Analisis Laporan Keuangan Sebagai Dasar dalam Penilaian Kinerja Keuangan PT. Budi Satria Wahana Moto. "Universitas Bandar Lapung 5 No.1 (2018)
- Undang- Undang No. 6 Tahun 2014.
- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 20 Tahun 2018 ,Pengelolaan Keuangan Desa.
- Andini, Hanni. 2018. "Penerpan Prinsip Akuntabilitas dan Prinsip Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan Desa". Sripsi Sarjana; Program Studi Akuntansi: Yogyakarta.
- Lubis,Sri Masta Yusniari. 2019. "Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Pertanggung jawaban Keuangan Desa". Skripsi Sarjana; Program Studi Akuntansi Syariah: Medan.

Maulidiyah,Syifa'ul. 2019. "Akuntabilitas dan Transparansi dalam Penyusunan Laporan Keuangan dan Pengelolan Dana Desa". Skripsi Sarjana;Program Studi Akuntansi: Surabaya.

Miftahuddin. 2018. "Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa". Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi: Yogyakarta.

Widiyanti, Arista. 2017. "Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa". Skripsi Sarjana; Jurusan Akuntansi: Malang.





Narasumber : Syamsul Taju

Jabatan : Kepala Desa

Tanggal : 21 Juni 2021

1. Bagaimana mekanisme perencanaan program alokasi dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa?

Kalau terkait perencanaan tentu dimulai daripada musyawarah ditingkat dusun kemudian dilanjutkan ke tingkat desa disitulah kemudian kita musyawarah untuk menentukan program-program atau kegiatan yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan pada anggaran yang akan datang

2. Siapa saja yang hadir dalam musyawarah terkait perencanaan program alokasi dana desa Maritengngae?

Semua perwakilan kompenen masyarakat diundang. Yang pertama tentu kita libatkan Babinsa, Babhinkamtibnas kemudian ketua BPD dan seluruh jajaran, para kepala dusun selaku penguasa wilayah, kemudian tokoh-tokoh masyarakat seperti tokoh tani, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh wanita semua kita libatkan dalam musyawarah desa

3. Bagaimana pemerintah desa dalam mengakomondir segala masukan dari peserta musyawarah terkait perencanaan aloksi dana desa?

Tentu kita melihat skala prioritas penggunaannya, artinya kita berbicara kebutuhan dasar masyarakat baik itu dibidang pendidikan, kesehatan setelah itu infrastruktur lainnya dan dibidang pemberdayaan.

4. Apa saja program- program kegiatan pada tahun anggaran 2020?

Tentunya program- program yang sudah disepakati paada saat musyawarah desa seperti peningkatan jaringan irigasi P3 PTGAI, bantuan pengelolaan pupuk organik, bantuan sarana & prasarana pertanian yang ditujukan untuk kelompok tani. Selain itu pembangunan infarastruktur jalan seperti rabat beton dan pengaspalan jalan poros

- 5. Dari program tersebut, siapa yang menjadi kelompok target/sasarannya? Kan begini mayoritas penduduk desa Maritengngae berprofesi sebagai petani jadi program seperti peningkatan jaringan irigasi, dan bantuan sarana dan prasarana pertanian yang menjadi target sasarannya yaitu petani.
- 6. Bagaimana proses pelaksanaan dari program-program yang sudah direncakan?

 Jadi pelaksanaan program desa dilakukan oleh perangkat desa atau unsur masyarakat desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebelum pelaksanaan program desa pastinya terlebih dahulu diinformasikan kepada masayarakat melalui sosialisasi kegiatan.
- 7. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program desa?

 Sejauh ini kita mengatakan bahwa alhamdulillah, kadang- kadang masyarakat tingkat kesibukannya juga tinggi tapi artinya selalu kita berusaha semaksimal mungkin supaya mereka menjadi bagian daripada pembangunan memberikan masukan dan saran.
- 8. Bagaimana mekasnisme pembuatan keputusan mengenai perencanaan alokasi dana desa?

Kalau masalah keputusannya dibuat secara tertulis dan dimusayawarahkan dengan BPD dan masyarakat artinya semua mengikuti regulasi yang sudah ada yang sudah diberikan oleh pemerintah pusat.

9. Apakah tersedia informasi yang tepat dan akurat mengenai jumlah alokasi dana desa?

Ya, ada baliho transparansi, dimana setiap realisasi pertama ada namaya baliho APDdes, kemudian ada realisasi tahap pertamanya, realisasi tahap kedua dan realisasi tahap ketiga dan setia ada kegiatan seperti perubahan APBdes pasti ada karena itu sudah menjadi keharusan dan kewajiban pemerintah desa.

10. Apa manfaat ADD dalam pembangunan?

Kalau seperti itu masyarakat bisa menilai kalo menurut kami sih alhamdulillah masyarakat mungkin yang dulunya katakanlah aksesnya kurang bagus sekarang sudah bisa lebih baik lagi. Lebih banyak memberikan dampak positif kepada masyarakat

11. Apakah telah sesuai hasil pelaksanaan program alokasi dana desa yang telah direncanakan sebelumnya?

Alhamdulillah sejauh ini sudah sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya

12. Bagaimana pemerintah desa dalam melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaan alokasi dana desa?

Kita membuat baliho transparansi, kemudian kita juga laporkan kepada BPD selaku perwakilan masyarakat tiap kegiatan dan yang kita libatkan dalam pembangunan itu masyarakat desa setempat.

13. Bagaimana peran pemerintah desa dalam mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi kepada masyarakat mengenai proses pelaksanaan alokasi dana desa?

Dari sisi pelaksanaan tentu saja di setiap proyek pembangunan dana desa kita tampilkan papan pelaksanaan, jadi disitu ada informasi mengenai volume,

dananya berapa, dan sebagainya disitu ada, itu dari sisi pelaksanaan. Kemudian dari sisi pertanggungjawaban, kita selalu memasang baliho di depan kantor desa untuk bisa memberikan informasi pada warga dan pada akhir tahun kita akan membuat laporan pertanggungjawaban, laporan tahunan itu kita sampaikan kepada Camat, Dinas PMD Kabupaten, Inspektorat Kabupaten dan juga diserahkan kepada BPD untuk disampaikan kepada warga.

- 14. Apakah proses pelaksanaan ADD dilakuka secara terbuka?
 - Yah seperti yang saya katakan sebelumnya setiap kegiatan yang dilakukan pasti diberitahukan terlebih dahulu kepada masyarakat.
- 15. Bagaimana pemerintah desa dalam melaksanakan prinsip transparansi terkait alokasi dana desa?

Transparansi dalam perencanaan dan pelaksanaan. Adapun didalam pelaksanaan kegiatan kita membuat semacam pengumuman atau papan informasi, kita beritahukan kepada masyarakat mengenai dananya berapa, volume yang dicapai berapa, pekerjaannya apa kita tunjukkan dengan papan nama untuk satu kegiatan selain itu kita membuat baliho mengenai realisasi APBDes yang bisa dibaca oleh siapa saja.

16. Apa saja faktor pendukung yang mempengaruhi akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan dana desa?

Yang pertama partisipasi masyarakat, kedua memang adanya tuntutan dari regulasi kemudian setiap tahap kegiatan itu selalu ada pemeriksaan dari pihak insepektorat, selalu dievaluasi, intinya kita berusaha supaya apa yang kita kelola ini bisa diketahui oleh masyarakat.

17. Apakah ada kendala dalam proses pengelolaan alokasi dana desa?

Pasti ada yang pertama kadang-kadang jabatan polik seperti inikan kita tidak lepas dari masyarakat yang memang mempunyai tujuan lain, kdang-kadang merasa bahwa apa yang terjadi pengelolaan-pengelolaan keuangan itu, seolah olah kesannya bahwa ada yang salah. Kedua, banyak juga lembaga-lembaga masyarakat yang memang sengaja mencari kesalahan. Intinya yang kami lakukan bahwa kami selalu berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait yang namanya inspektorat atau pihak-pihak lain dan ketiga partisipasi mayarakat agak kurang ketika kita undangan kadang tidak hadir tapi setelah pelaksanaan ada hal-hal yang kurang biasanya ada yang protes padahal waktu kita undang dia yang tidak hadir

- 18. Bagaimana mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa?
 - Memang ada ketentuannya, ada regulasi yang dikeluarkan semuanya diatur dalam peraturan bupati, ketika kita sudah melaksanakan kegiatan kita laporkan berdasarkan regulasi yang ada
- 19. Apa saja jenis pelaporan yang dilakukan pemerintah desa dalam proses pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa?
 - Banyak sekali, setiap kegiatan harus dilaporkan. Kegiatan yang menggunakan dana desa harus dilaporkan. Dana yang kita anggarkan atau tidak juga harus dilaporkan
- 20. Apakah ada kesulitan dalam membuat pelaporan dan pertanggungjawaban administrasi?

- Tidak, karena sudah ada regulasi yang mengatur tentang pelaporan dan pertanggungjawaban
- 21. Apakah masyarakat diberi kesempatan yang sama dalam penyusunan program alokasi dana desa?
 - Ya masyarakat di bebaskan untuk mengajukan usulan- usulan mengenai program desa dan diberikan kesempatan yang sama untuk berpendapat
- 22. Bagaimana upaya pemerintah desa untuk mendapatkan kepercayaan oleh masyarakat?
 - Berusaha memberikan yang terbaik berusaha melaksanakan pengelolaan keuangan yang baik sesuai prnsip akuntabilitas, pertama melakukan pengelolaan umum sesuai aturan yang ada kedua senantiasa memberikan informasi kepada masayarakat yang ketiga berusaha memberdayakan semua masyarakat yang ada di desa.
- 23. Apakah pelaporan dan pertanggungjawaban sudah sesuai dengan standar yang berlaku?

Ya, sudah pasti sesuai dengan standar karena kita berpedoman pada regulasi dari pusat.

PAREPARE

Narasumber: Anas Putra

Jabatan : Sekretaris Desa

Tanggal : 21 Juni 2021

1. Bagaimana mekanisme perencanaan program alokasi dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa?

Sebelum kita masuk ke tahun anggaran baru seblumnya kita melakukan musyawarah terlebih dahulu terkait perencanaan kemudian hasil dari musyawarah akan diprefikasi ulang oleh pemerintah desa mengenai usulan- usulan kemudian diajukan rancangannya ke BPD untuk ditetapkan sebagai peraturan desa

2. Siapa saja yang hadir dalam musyawarah terkait perencanaan program alokasi dana desa Maritengngae?

Kita mengundang tokoh masyarakat, Babinsa, Babhinkamtibnas dan pengurus BPD

3. Bagaimana pemerintah desa dalam mengakomondir segala masukan dari peserta musyawarah terkait perencanaan aloksi dana desa?

Kami mendengarkan setiap usulan dari masyarakat kemudian ditentukan dengan skala prioritas dari yang penting, tidak penting sampai yang harus segera dilaksanakan.

4. Apa saja program- program kegiatan pada tahun anggaran 2020?

Jadi terdiri dari lima bidang, dari bidang- bidang tersebut terdiri dari sub kegaiatan seperti penyelenggaraan PAUD, pemberian makanan tambahan pada posyandu, pemeliharaan jalan desa, pelatihan- pelatihan kemayarakatan, peningkatan saluran irigasi dan peningkatan saluran tambak

- 5. Dari program tersebut, siapa yang menjadi kelompok target/sasarannya?

 Contohnya itu pada program pemberian makanan tambahan pada posyandu yang menjadi kelompok targetnya pasti ibu-ibu yang memiliki balita. Adapun untuk peningkatan saluran tambak yang menjadi target/sasarannya yaitu yang bekerja dalam bidang perikanan khusunya sektor komoditi hasil tambak.
- Bagaimana proses pelaksanaan dari program-program yang sudah direncanakan?
 Misalnya dalam bidang pembangunan masayrakat terlibat langsung sebagai pekerja
- 7. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program desa?

 Jadi masyarakat terlibat dalam perencanaan melalui musyawarah desa, terlibat dalam pelaksanaan dengan menjadi pekerja dan memegang fungsi pengawasan juga.
- 8. Bagaimana mekasnisme pembuatan keputusan mengenai perencanaan alokasi dana desa?
 - Mekanismenya yaitu dengan musyawarah terus jika ada usulan kita evaluasi kemudian kita usulkan ke BPD untuk ditetapkan apabila sudah sesuai dengan yang diusulkan i musyawarah
- 9. Apakah tersedia informasi yang tepat dan akurat mengenai jumlah alokasi dana desa?

Ya melalui media informasi yaitu baliho yang dipasang ditempat strategis

- 10. Apa manfaat ADD dalam pembangunan?
 - Untuk meningkatkan sarana dan prasarana yang bermanfaat bagi masyarakat.
- 11. Apakah telah sesuai hasil pelaksanaan program alokasi dana desa yang telah direncanakan sebelumnya?

Alhamdulillah sejauh ini sudah sesuai.

- 12. Bagaimana pemerintah desa dalam melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaan alokasi dana desa?
 - Termasuk yang didepan kita tampilkan transparansi dengan baliho terus dalam pengerjaan proyek ada papan proyek dan setiap akhir tahun kita adakan musyawarah pertanggungjawaban
- 13. Bagaimana peran pemerintah desa dalam mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi kepada masyarakat mengenai proses pelaksanaan alokasi dana desa?
 - Kita adakan baliho transparansi dan juga di masjid- masjid kita sampaikan apaapa yang dilaksanakan tiap dusun.
- 14. Apakah proses pelaksanaan ADD dilakuka secara terbuka?
 Tentu saja sebelum melakukan kegiatan pasti diinformasikan kepada masyarakat
- 15. Bagaimana pemerintah desa dalam melaksanakan prinsip transparansi terkait alokasi dana desa?
 - Memasang baliho transp<mark>ara</mark>nsi dari realisasi tahap 1, 2 & 3
- 16. Apa saja faktor pendukung yang mempengaruhi akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan dana desa?
 - Partisipasi masyarakat
- 17. Apakah ada kendala dalam proses pengelolaan alokasi dana desa?
 Regulasi yang berubah- ubah sehingga memperlambat dalam penyusunan anggaran
- 18. Bagaimana mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa?

- Kan terdiri dari tiga tahap jadi kita melaporkan pertanggungjwaban setiap tahapnya melalui kecamatan dan ditembuskan ke kabupaten melalui dinas pemberdayaan masyarakat
- 19. Apa saja jenis pelaporan yang dilakukan pemerintah desa dalam proses pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa?
 - Ada laporan keuangan,laporan kas, laporan realisasi,laporan kekayaan aset dan laporan realisasi pajak
- 20. Apakah ada kesulitan dalam membuat pelaporan dan pertanggungjawaban administrasi?
 - Kesulitannya pada regulasi dari pusat yang kadang berubah- ubah kadang kita sudah menyusun anggaran tetapi dengan adanya perubahan regulasi sehingga mengharuskan kita melakukan review untuk menyesuaikan.
- 21. Apakah masyarakat diberi kesempatan yang sama dalam penyusunan program alokasi dana desa?
 - Pasti, apa yang menjadi keputusan suara terbanyak itu yang kita laksanakan. Tapi disini kita bicara mengenai prioritas bukan keinganan pribadi dari pemerintah desa itu sendiri.
- 22. Bagaimana upaya pemerintah desa untuk mendapatkan kepercayaan oleh masyarakat?
 - Dengan selalu berusaha meningkatkan transparansi kepada masyarakat dan selalu berusaha agar masyarakat terlibat dalam proses pengelolaan dan pelaksanaan program-program desa

23. Apakah pelaporan dan pertanggungjawaban sudah sesuai dengan standar yang berlaku?

Begini untuk pengelolaan dana desa kita sudah mengacu pada Permendagri No. 20 Tahun 2018 mulai dari pencatatannya sampai pelaporannya kemudian ditindak lanjuti dengan Perbup No. 13 Tahun 2019 jadi kita melakukan kegiatan sesudai dengan regulasi yang ada dari pusat



Narasumber : Nur Asizah Soraya

Jabatan : Kaur Keuangan

Tanggal : 21 Juni 2021

1. Bagaimana mekanisme perencanaan program alokasi dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa?

Sebenarnya perencanaan itu sudah ada yang namanya RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) itu melalui masukan- masukan di wilayah dusun lewat tokoh-tokoh masyarakat sehingga masukan-masukan permasalahan itu kita rangkum melalui Musrembang (Musyawarah Rencana Pembangunan Desa). Nah disitu dirangkum kemudian nanti ditentukan dari skala prioritas

2. Siapa saja yang hadir dalam musyawarah terkait perencanaan program alokasi dana desa Maritengngae?

BPD, tokoh masyarakat dan tokoh- tokoh lembaga

3. Bagaimana pemerintah desa dalam mengakomondir segala masukan dari peserta musyawarah terkait perencanaan aloksi dana desa?

Masyarakat diberi kesempatan yang sama untuk mengajukan usulan- usulan tetapi tidak semua usulan dapat kita terima karena kita melihat dari skala prioritas

4. Apa saja program- program kegiatan pada tahun anggaran 2020?

Pada bidang pembinaan masyarakat sepeti pembinaan PKK, penguatan kapasitas Linmas. Pada bidang pembangunan seperti rabat beton dan pengaspalan jalan poros.

- 5. Dari program tersebut, siapa yang menjadi kelompok target/sasarannya?
 Pada bidang pembinaan PKK yang menjadi targetnya yaitu kelompok PKK adapun rabat beton dan pengaspalan jalan poros yang menjadi sasarannya yaitu masyarakat desa maritengngae.
- 6. Bagaimana proses pelaksanaan dari program-program yang sudah direncakan?

 Ada beberapa tahap dalam pelaksanaan program pembangunan desa yaitu penetapan pelaksanaan kegiatan, penyusunan rencana kerja, sosialisasi kegiatan, pembekalan pelaksanaan kegiatan, penyiapan dokumen administrasi, pengadaan tenaga kerja dan pengadaan bahan/material.
- 7. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program desa?
 Dalam pelaksanaan pogram seperti pembangunan masyarakat terlibat langsung sebagai pekerja dan sebagai pengawas secara tidak langsung
- 8. Bagaimana mekasnisme pembuatan keputusan mengenai perencanaan alokasi dana desa?
 - Pada saat musyawarah bersama tokoh masyarakat dibuat secara tertulis
- 9. Apakah tersedia informasi yang tepat dan akurat mengenai jumlah alokasi dana desa?
 - Iya dapat dilihat melalui baliho yang dipasang ditempat strategis yang dapat dilihat oleh masyarakat desa
- 10. Apa manfaat ADD dalam pembangunan?
 - Kalau infrastruktur jalannya baik otomatis perekonomian juga baik
- 11. Apakah telah sesuai hasil pelaksanaan program alokasi dana desa yang telah direncanakan sebelumnya?

- Kalau untuk ADD sudah sesuai dengan perencanaan sih cuma ada beberapa kegiatan yang misalnya perencanaannya sekian kemudian di tengah jalan ada pengurangan atau apa mengakibatkan adanya Silpa
- 12. Bagaimana pemerintah desa dalam melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaan alokasi dana desa?
 - Kalau secara akuntabilitas, kita sesuai dengan juknis pelaksanaan dana desa. Terus nanti setiap kegiatan yang didanai dana desa akan kita pasang papan kegiatan. Di papan kegiatan itu tercantum anggaran, volume, dan tanggal pelaksanaan, seperti itu. Papan itu akan dipasang di setiap dilakukannya kegiatan yang bersumber dana desa, termasuk yang bukan bersumber dari dana desa saja kita pasangin dan pemerintah desa melaporkan laporan realisasi penggunaandana desa serta laporan pertanggungjawaban yang juga dilaporkan kepada masyarakat dan BPD
- 13. Bagaimana peran pemerintah desa dalam mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi kepada masyarakat mengenai proses pelaksanaan alokasi dana desa?
 - Dengan menyediakan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat yaitu dengan media baliho
- 14. Apakah proses pelaksanaan ADD dilakuka secara terbuka?
 - Pemerintah Desa sudah melibatkan Masyarakat beserta Lembaga-lembaga yang ada di Desa dalam Musrenbangdes yang membahas proses pengelolaan Dana Desa.
- 15. Bagaimana pemerintah desa dalam melaksanakan prinsip transparansi terkait alokasi dana desa?

Kan sebelum pelaksanaan, kita melakukan musyawarah terlebih dahulu terkait perencanaan, Kita mengundang tokoh masyarakat, Babinsa, Babhinkamtibnas dan pengurus BPD. Kalau untuk transparansinya itu kita melibatkan masyarakat baik itu dalam perecanaan maupun pelaksanaan. Biasanya ada rapat dengan BPD selaku perwakilan masyarakat kita sampaikan rencana dan realisainya ada sisa atau tidak kita laporkan ke BPD. Selain itu ada plang (papan proyek), kemudian kita juga ada baliho yang kita pasang di tempat strategis yaitu di depan kantor desa.

- 16. Apa saja faktor pendukung yang mempengaruhi akuntabilitas dan transparansi laporan keuanga<mark>n dana d</mark>esa?
 - Yang paling utama yaitu partisipasi masyarakat baik dalam hal musyawarah maupun berpartisipasi dalam pelaksanaan. Keterlibatan masyarakat diperlukan dalam proses perencanaan program dan pelaksanaan program. Sehingga terjadi koordinasi yang baik antara pihak perangkat desa dengan masyarakat untuk mewujudkan sistem tata kelola yang akuntabel dan transparan.
- 17. Apakah ada kendala dalam proses pengelolaan alokasi dana desa?

 Terkait dengan kendala tentu ada yaitu kendala mengenai format laporan yang berubah- ubah, karena adanya perubahan Undang-Undang maupun perubahan peratuan bupati. Selain itu karena dana yang masuk ke kas desa juga terlmbat maka pekerjaan juga ikut berpengaruh
- 18. Bagaimana mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa?

- wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada pihak Kecamatan, Dinas PMD Kabupaten dan Inspektorat Kabupaten setiap akhir tahun anggaran
- 19. Apa saja jenis pelaporan yang dilakukan pemerintah desa dalam proses pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa?
 - Kalau kita laporan lengkap yah yaitu Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yang didalamnya memuat laporan realisasi APBDes dan catatan atas lapora keuangan
- 20. Apakah ada kesulitan dalam membuat pelaporan dan pertanggungjawaban administrasi?
 - Kalau kesulitannya biasanya itu dari regulasi yang selalu berubah- ubah sehingga kadang memperlambat pelaksanaan kegiatan terkadang kita sudah menyusun anggaran terus ada perubahan regulasi otomatis kita melakukan review lagi
- 21. Apakah masyarakat diberi kesempatan yang sama dalam penyusunan program alokasi dana desa?
 - Jelas, masyarakat diberikan kesempatan yang sama untuk mengajukan usulanusulan pada saat musyawarah desa
- 22. Bagaimana upaya pemerintah desa untuk mendapatkan kepercayaan oleh masyarakat?
 - Jadi kita berusaha untuk terbuka kepada masyarakat dengan prinsip transparansi dan akuntabel yang merupakan kewajiban bagi kita selaku pengurus desa
- 23. Apakah pelaporan dan pertanggungjawaban sudah sesuai dengan standar yang berlaku?
 - Ya sudah sesuai kita mengacu pada pedoman yaitu Permendagri No. 20 Tahun 2018 dan ditindak lanjuti dengan Perbup No. 13 tahun 2019.

Narasumber : Ridwan S.Pi

Jabatan : Ketua Karang Taruna

Tanggal : 29 Juni 2021

1. Apakah sebelum pelaksanaan program pembangunan desa di Desa Maritenggae ada musyawarah terlebih dahulu?

Iya sebelum pelaksanaan program kerja pembangunan desa, aparat desa melaksanakan musyawarah terlebih dahulu dengan membahas apa yang akan menjadi prioritas pembangunan yang akan di laksanakan di desa

2. Siapa saja yang hadir dalam musyawarah perencanaan alokasi dana desa?

Yang diundang dalam musyawarah adalah orang-orang yang terkait dalam aparatur desa baik itu aparatur desa sendiri, para kepala dusun, BPD, Karang Taruna, Tokoh Pemuda, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

3. Bagaimana pemerintah desa dalam mengakomodasi segala masukan dari peserta musyawarah?

Aparat/pemerintah desa menerima, merangkum dan mempertimbangkan masukan- masukan peserta musyawarah demi kelancaran kegiatan-kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan. Adapun dalam pengambilan keputusan berdasarkan skala prioritas.

4. Apakah masyarakat diberi kesempatan yang sama dalam penyusunan program alokasi dana desa?

Ya, sebab pemerintah desa tidak mau jalan sendiri tanpa ada kerja sama dengan masyarakat yang ada di desa, makanya tidak akan terlaksana tanpa adanya

- kesepakatan dengan peserta musyawarah apalagi masyarakatlah yang dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan
- 5. Apakah tersedia informasi yang tepat dan akurat mengenai jumlah alokasi dana desa?
 - Informasi yang dimunculkan/dipaparkan oleh pemerintah desa sangat jelas mulai dari jumlah yang akan digunakan serta pembagiannya sangat akurat sehingga tidak ada sanggahan atau komentar yang mengganggu jalannya kegiatan nantinya
- 6. Bagaimana keterbukaan pemerintah desa mengenai proses pengelolaan dana desa?
 - Sangat terbuka dan tidak ada yang disembunyikan karena tetap diawasi oleh masyarakat setempat serta mereka juga paham tentang kerugian jika melakukan kecurangan di kemudian hari terkait penyelewengan dana desa
- 7. Apakah ada partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan alokasi dana desa?

 Masyarakat berpartisipasi sebagai pengawas kegiatan, pelaksana kegiatan dan pengarah kegiatan
- 8. Apakah masyarakat mudah dalam mendapatkan informasi mengenai alokasi dana desa?
 - Dalam hal ini pemerintah desa terbuka kepada masyarakat yang ingin mengetahui informasi mengenai alokasi dana desa. Jika ada masyarakat yang ingin tahu lebih jelas tentang berapa dana yang digunakan serta pembagiannya
- 9. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa terkait pelaporan dan pertangungjawaban dana desa?

Pertama mempersiapkan prosedur/ proses kegiatan yang dilaksanakan mulai dari berita acara nota- nota pesanan serta bukti fisik dari alokasi dana desa agar masyarakat mudah paham sehingga tidak protes kemudian mengundang kembali para peserta musyawarah pengelolaan dana desa untuk dijelaskan sampai mana dana desa yag dipergunakan

10. Bagaimana tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa tekait dengan pengelolaan dana desa?

Masyarakat mempercayakan dana desa sepenuhnya dikelola oleh pemerintah desa.



Narasumber: Muh Jufri. B

Jabatan : LKD

Tanggal : 29 Juni 2021

1. Apakah sebelum pelaksanaan program pembangunan desa di Desa Maritenggae ada musyawarah terlebih dahulu?

Iya pasti diadakan musyawarah desa terlebih dahulu

2. Siapa saja yang hadir dalam musyawarah perencanaan alokasi dana desa?

BPD, LKD, Kepala Dusun, tokoh mayarakat dan tokoh pemuda

3. Bagaimana pemerintah desa dalam mengakomodasi segala masukan dari peserta musyawarah?

Pemerintah desa menerima segala usulan dari peserta musyawarah berdasarkan hasil musyawarah

4. Apakah masyarakat diberi kesempatan yang sama dalam penyusunan program alokasi dana desa?

Iye pasti memiliki <mark>kesempatan yang sa</mark>ma kalau masalah itu kan dimusyawarahkan dulu kemudian pada musyawarah masyarakat bebas memberikan usulan.

5. Apakah tersedia informasi yang tepat dan akurat mengenai jumlah alokasi dana desa?

Iya klo menurut saya pribadi tersedia informsi yang transparan

6. Bagaimana keterbukaan pemerintah desa mengenai proses pengelolaan dana desa?

- Pemerintah desa secara transparan mengelola dana desa sesuai dengan regulasi yang ada
- Apakah ada partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan alokasi dana desa?
 Iya, masyarakat ikut serta dalam pembangunan dan pelaksanaan programprogram desa
- 8. Apakah masyarakat mudah dalam mendapatkan informasi mengenai alokasi dana desa?
 - Iya sangat mudah, dikarenakan adanya baliho transparansi terkait laporan realisasi APBdes yang dipasang pada tempat- tempat strategis salah satu contohnya yaitu dipasang di depan kantor desa sehingga memudahkan masyarakat untuk mendaptkan informasi tentang alokasi dana desa.
- 9. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa terkait pelaporan dan pertangungjawaban dana desa?
 - Bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa yaitu melalui LPJ
- 10. Bagaimana tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa tekait dengan pengelolaan dana desa?

Dipercayakan penuh kepada pemerintah desa berdasarkan hasil musyawarah

PAREPARE

Narasumber : Supratman Umar, S.Pd

Tempat : Dusun Tamappa, Desa Maritengngae

Tanggal: 29 Juni 2021

1. Apakah sebelum pelaksanaan program pembangunan desa di Desa Maritenggae ada musyawarah terlebih dahulu?

Iye ada

2. Siapa saja yang hadir dalam musyawarah perencanaan alokasi dana desa?

Pengurus Desa Maritengngae dan tokoh masyarakat

3. Bagaimana pemerintah desa dalam mengakomodasi segala masukan dari peserta musyawarah?

Menerima segala masukan dari peserta musyawarah

4. Apakah masyarakat diberi kesempatan yang sama dalam penyusunan program alokasi dana desa?

Iya masyarakat bebas be<mark>rp</mark>end<mark>apat mengen</mark>ai <mark>usu</mark>lan program program desa

5. Apakah tersedia informasi yang tepat dan akurat mengenai jumlah alokasi dana desa?

Iya tersedia seperti yang dipasang didepan kantor desa.

6. Bagaimana keterbukaan pemerintah desa mengenai proses pengelolaan dana desa?

Dengan melibatkan masyarakat dalam musywarah, melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan program-program desa.

7. Apakah ada partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan alokasi dana desa?

Ya, sebagai pekerja dalam pembangunan desa

8. Apakah masyarakat mudah dalam mendapatkan informasi mengenai alokasi dana desa?

Ya sangat mudah karena pengurus desa sangat loyal kepada masyarakat sekitar dan selalu memberitahukan masyarakan jika ingin melaksanakan program desa

9. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa terkait pelaporan dan pertangungjawaban dana desa?

Bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa yaitu bentuk laporan pertanggungjawaban (LPJ) yang dipaparkan setiap akhir tahun.

10. Bagaimana tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa tekait dengan pengelolaan dana desa?

Sangat percaya, dengan apa yang dilakukan pemerintah desa dalam mengelola dana desa karena tujuan dan langkahnya sangat jelas dan dimengerti sehingga masyarakat juga bisa menikmati hasil yang diperloleh dari anggaran dana desa tersebut.

PAREPARE

Narasumber : Nur Zariuna

Tempat : Masyarakat Dusun Tamappa, Desa Maritengngae

Tanggal : 29 Juni 2021

1. Apakah sebelum pelaksanaan program pembangunan desa di Desa Maritenggae ada musyawarah terlebih dahulu?

Iye, karena hal itu adalah rutinitas setiap akan diadakan program pembangunan desa maka dilakukan musyawrah.

- 2. Siapa saja yang hadir dalam musyawarah perencanaan alokasi dana desa?
 Pemerintah desa biasanya mengundang masyarakat-masyarakat desa yang tergabung dalam struktur organisasi desa. Musyawarah perencanaan alokasi dana desa biasa dihadiri segenap undangan yang sebelumnya sudah kusebutkan tadi
- 3. Bagaimana pemerintah desa dalam mengakomodasi segala masukan dari peserta musyawarah?

Dengan sikap menghargai segala pendapat (toleransi) pemerintah desa menampung dan merespon dengan baik segala sesuatu yang diutarakan oleh audiens

- 4. Apakah masyarakat diberi kesempatan yang sama dalam penyusunan program alokasi dana desa?
 - Iye, dalam pelaksanaannya klo menurutku pemerintah desa tidak pernah berat sebelah dalam memberikan kesempatan kepada masyarakat
- 5. Apakah tersedia informasi yang tepat dan akurat mengenai jumlah alokasi dana desa?

- Iya tersedia, namun kendala yang biasa terjadi yakni kurangnya pemahaman masyarakat dalam memahami hal tersebut.
- 6. Bagaimana keterbukaan pemerintah desa mengenai proses pengelolaan dana desa?

Menurutku sangat terbuka

- 7. Apakah ada partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan alokasi dana desa? Ya masyarakat-masyarakat tertentu ikut berpatisipasi
- 8. Apakah masyarakat mudah dalam mendapatkan informasi mengenai alokasi dana desa?

Mudah

- 9. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa terkait pelaporan dan pertangungjawaban dana desa?
 - Dengan melakukan kalkukasi dari setiap program, melakukan dokumentasi dan mengarsipkan segala berkas yang terkait program/dana dan terakhir selalu diadakannya rapat
- 10. Bagaimana tingkat kep<mark>erc</mark>ayaan masyarakat terhadap pemerintah desa tekait dengan pengelolaan dana desa?

kalau saya pribadi percaya akan tindak lanjut dana desa yang dikelola pemerintah. Karena bagusmi terbukaji sama masyarakat Cuma yang kuliat ada beberapa pihak yang kadang menjatuhkan atau memandang sebelah mata karena mungkin itumi masalah pribadi nabawa- bawa

Narasumber : Anas Saputra, SS

Tempat : Dusun Alakkang, Desa Maritengngae

Tanggal : 29 Juni 2021

1. Apakah sebelum pelaksanaan program pembangunan desa di Desa Maritenggae ada musyawarah terlebih dahulu?

Dilakukan musyawarah dusun dan dilajutkan dengan musyawarah desa.

2. Siapa saja yang hadir dalam musyawarah perencanaan alokasi dana desa?

Tokoh masyarakat, aparat desa, Babinsa dan bhabinkantibnas

3. Bagaimana pemerintah desa dalam mengakomodasi segala masukan dari peserta musyawarah?

Menerima segala masukan unruk selanjutnya dapat dituangkan dalam RJMDES (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa)/ Usulan Musrembang

4. Apakah masyarakat diberi kesempatan yang sama dalam penyusunan program alokasi dana desa?

Iya diberi kesempatan yang sama

5. Apakah tersedia informasi yang tepat dan akurat mengenai jumlah alokasi dana desa?

Tersedia informasi jumlah ADD yang dipasang di lokasi strategis

6. Bagaimana keterbukaan pemerintah desa mengenai proses pengelolaan dana desa?

Mengenai keterbukaan disampaikan kepada masyarakat dengan menginformasikannya melalui baliho yang dipasang di tempat- tempat strategis

- 7. Apakah ada partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan alokasi dana desa?
 Ada keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat dan keterlibatan dalam pembangunan fisik
- 8. Apakah masyarakat mudah dalam mendapatkan informasi mengenai alokasi dana desa?

Terseia indormasi ADD yang dipasang di tempat strategis

9. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa terkait pelaporan dan pertangungjawaban dana desa?

Dengan pelaporan di akhir tahun

10. Bagaimana tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa tekait dengan pengelolaan dana desa?

Masyarakat sepenuhnya memberikan kepercayaan kepada pemerintah desa dalam mengelola dana desa



Narasumber: Fatmawati

Tempat : Masyarakat Dusun Tamappa, Desa Maritengngae

Tanggal: 29 Juni 2021

 Apakah sebelum pelaksanaan program pembangunan desa di Desa Maritenggae ada musyawarah terlebih dahulu?

Iya dilakukan musyawarah terlebih dahulu.

2. Siapa saja yang hadir dalam musyawarah perencanaan alokasi dana desa?

Perwakilan masyarakat yang diundang

3. Bagaimana pemerintah desa dalam mengakomodasi segala masukan dari peserta musyawarah?

Kurang tau, karena saya sendiri tidak pernah menghadiri musyawarah desa

4. Apakah masyarakat diberi kesempatan yang sama dalam penyusunan program alokasi dana desa?

Kurang tau

5. Apakah tersedia informasi yang tepat dan akurat mengenai jumlah alokasi dana desa?

Kalau informasi ada baliho di depan kantor desa tetapi saya kurang kurang mengerti maksudnya apa dan program apa saja yang dilakukan karena pada baliho tersebut tidak menerangkan secara jelas mengenai program desa yang sudah terlaksana atau belum

6. Bagaimana keterbukaan pemerintah desa mengenai proses pengelolaan dana desa?

Keterbukaannya itu melalui baliho yang dipasang didepan kantor desa

- 7. Apakah ada partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan alokasi dana desa? Iya masyarakat terlibat dalam pelaksanaan pembangunan
- 8. Apakah masyarakat mudah dalam mendapatkan informasi mengenai alokasi dana desa?
 - Kalau informasi secara umum mengenai dana desa bisa dilihat di depan kantor desa tapi kalau saya sendiri kurang mengerti dananya untuk apa saja
- 9. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa terkait pelaporan dan pertangungjawaban dana desa?
 - Biasanya ada musyawarah tapi saya sendiri tidak pernah ikut dalam musyawarah desa karena yang bisa masuk cuma orang yang punya undangan
- 10. Bagaimana tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa tekait dengan pengelolaan dana desa?

Berbeda- beda tergantung masyarakatnya sendiri



Narasumber : Junaedy

Tempat : Dusun Barakasanda, Desa Maritengngae

Tanggal: 30 Juni 2021

1. Apakah sebelum pelaksanaan program pembangunan desa di Desa Maritenggae ada musyawarah terlebih dahulu?

Iya ada musyawarah

2. Siapa saja yang hadir dalam musyawarah perencanaan alokasi dana desa?

Yang diundang itu cuma perwakilan masyarakat saja

3. Bagaimana pemerintah desa dalam mengakomodasi segala masukan dari peserta musyawarah?

Kurang tau

4. Apakah masyarakat diberi kesempatan yang sama dalam penyusunan program alokasi dana desa?

Kurang tau

5. Apakah tersedia informasi yang tepat dan akurat mengenai jumlah alokasi dana desa?

Kalau mengenai dana sih, saya lihat ada di depan kantor desa berupa baliho berisi pendapatan dan belanja desa.

6. Bagaimana keterbukaan pemerintah desa mengenai proses pengelolaan dana desa?

Salah satunya yaitu dengan baliho

7. Apakah ada partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan alokasi dana desa?

Ya tentu ada

8. Apakah masyarakat mudah dalam mendapatkan informasi mengenai alokasi dana desa?

Mungkin masyarakat yang terlibat dalam musyawarah mudah mengetahuinya karena LPJ dipaparkan pada saat musyawarah

9. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa terkait pelaporan dan pertangungjawaban dana desa?

Mengenai laporan pertanggungjawaban tidak semua masyarakat dapat mengetahui karena laporan pertanggungjawaban hanya dipaparkan setiap akhir tahun pada saat musyawarah jadi masyarakat yang tidak hadir atau yang tidak diundang otomatis tidak tau dapat mengenai realisasi dana desa secara lengkap

10. Bagaimana tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa tekait dengan pengelolaan dana desa?

Masih perlu ditingkatkan lagi dalam keterbukaan informasinya agar semua masyarakat bisa mengetahui dana yang digunakan.

PAREPARE

Narasumber : Sakwati

Tempat : Dusun Barakasanda, Desa Maritengngae

Tanggal: 30 Juni 2021

 Apakah sebelum pelaksanaan program pembangunan desa di Desa Maritenggae ada musyawarah terlebih dahulu?

Iya

2. Siapa saja yang hadir dalam musyawarah perencanaan alokasi dana desa?

Tokoh masyarakat

3. Bagaimana pemerintah desa dalam mengakomodasi segala masukan dari peserta musyawarah?

Kurang tau

4. Apakah masyarakat diberi kesempatan yang sama dalam penyusunan program alokasi dana desa?

Kurang tau

5. Apakah tersedia informasi yang tepat dan akurat mengenai jumlah alokasi dana desa?

Iya

6. Bagaimana keterbukaan pemerintah desa mengenai proses pengelolaan dana desa?

Dengan papan pengumuman

7. Apakah ada partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan alokasi dana desa? Iya masyarakat terlibat secara langsung

8. Apakah masyarakat mudah dalam mendapatkan informasi mengenai alokasi dana desa?

Iya mudah

9. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa terkait pelaporan dan pertangungjawaban dana desa?

Kalau itu saya kurang tahu

10. Bagaimana tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa tekait dengan pengelolaan dana desa?



Narasumber : Jumriana

Tempat : Dusun Alakkang, Desa Maritengngae

Tanggal: 30 Juni 2021

1. Apakah sebelum pelaksanaan program pembangunan desa di Desa Maritenggae ada musyawarah terlebih dahulu?

Iya tentu ada

Siapa saja yang hadir dalam musyawarah perencanaan alokasi dana desa?
 Setahu saya yang mendapatkan undangan itu yaitu tokoh- tokoh masyarakat

3. Bagaimana pemerintah desa dalam mengakomodasi segala masukan dari peserta musyawarah?

Menerima usulan masyarakat dalam forum musyawarah

4. Apakah masyarakat diberi kesempatan yang sama dalam penyusunan program alokasi dana desa?

Iya semua peserta musya<mark>wa</mark>rah berhak berbicara pada saat musyawarah

5. Apakah tersedia informasi yang tepat dan akurat mengenai jumlah alokasi dana desa?

Tersedia

6. Bagaimana keterbukaan pemerintah desa mengenai proses pengelolaan dana desa?

Yang saya lihat dengan menggunakan baliho yang dipasang didepan kantor desa tapi menurut saya kurang efektif karena kan Desa Maritengngae terdiri dari tiga

- dusun harusnya setiap dusun itu dipasang papan informasi supaya lebih jelas namun nyatanya hanya tersedia di depan kantor desa saja
- 7. Apakah ada partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan alokasi dana desa?
 Ya tentu ada misalnya terlibat langsung dalam program desa
- 8. Apakah masyarakat mudah dalam mendapatkan informasi mengenai alokasi dana desa?
 - Seperti yang saya bilang tadi informasi yang didapatkan belum menyeluh karena contohnya saja saya yang tinggal di Alakkang otomatis malas ke kantor desa hanya untuk melihat anggaran dana desa. Kan sekarang sudah zamannya pakai hp sebaiknya sih ada media sosial begitu jadi setiap ada kegiatan bisa diinformasikan supaya kita semua tau.
- 9. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa terkait pelaporan dan pertangungjawaban dana desa?

Kalau itu saya kurang tahu

10. Bagaimana tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa tekait dengan pengelolaan dana desa?

Sudah percaya sisa ditingkatkan lagi

PAREPARE

Narasumber: Arman

Tempat : Dusun Barakasanda, Desa Maritengngae

Tanggal: 30 Juni 2021

1. Apakah sebelum pelaksanaan program pembangunan desa di Desa Maritenggae ada musyawarah terlebih dahulu?

Ya selalu ada musyawarah

2. Siapa saja yang hadir dalam musyawarah perencanaan alokasi dana desa?

Tokoh masyarakat

3. Bagaimana pemerintah desa dalam mengakomodasi segala masukan dari peserta musyawarah?

Pemerintah desa memberikan hak kepada masyarakat untuk menyampaikan pendapatnya terkait usulan mengenai program desa kemudian dipertimbangkan.

4. Apakah masyarakat diberi kesempatan yang sama dalam penyusunan program alokasi dana desa?

Iya diberi kesempatan yang sama

5. Apakah tersedia informasi yang tepat dan akurat mengenai jumlah alokasi dana desa?

Iya tersedia

6. Bagaimana keterbukaan pemerintah desa mengenai proses pengelolaan dana desa?

Dengan adanya baliho transparansi

7. Apakah ada partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan alokasi dana desa?

Tentu saja masyarakat berpartisipasi

8. Apakah masyarakat mudah dalam mendapatkan informasi mengenai alokasi dana desa?

Gampang-gampang susah

9. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa terkait pelaporan dan pertangungjawaban dana desa?

Dengan LPJ

10. Bagaimana tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa tekait dengan pengelolaan dana desa?



Narasumber: Resky Amalia

Tempat : Dusun Alakkang, Desa Maritengngae

Tanggal: 30 Juni 2021

1. Apakah sebelum pelaksanaan program pembangunan desa di Desa Maritenggae ada musyawarah terlebih dahulu?

Setau saya ada

Siapa saja yang hadir dalam musyawarah perencanaan alokasi dana desa?
 Yang diundang tetapi tidak semuanya diundang cuma perwakilan saja

3. Bagaimana pemerintah desa dalam mengakomodasi segala masukan dari peserta musyawarah?

Peserta bebas mengeluarkan pendapat tetapi tidak semuanya bisa diterima

4. Apakah masyarakat diberi kesempatan yang sama dalam penyusunan program alokasi dana desa?

Iya tentu saja

5. Apakah tersedia informasi yang tepat dan akurat mengenai jumlah alokasi dana desa?

Iya ada didepan kantor desa

6. Bagaimana keterbukaan pemerintah desa mengenai proses pengelolaan dana desa?

Salah satunya yaitu dengan baliho

7. Apakah ada partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan alokasi dana desa?

Yang saya lihat masyarakat turut andil dalam pembangunan

8. Apakah masyarakat mudah dalam mendapatkan informasi mengenai alokasi dana desa?

Agak menyulitkan karena informasi dana desa itu ada di Barakasanda tepatnya di depan kantor desa. Jadi kita yang jauh kurang tau informasinya.

9. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa terkait pelaporan dan pertangungjawaban dana desa?

Kurang tau kalau masalah pelaporannya

10. Bagaimana tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa tekait dengan pengelolaan dana desa?

Kita percayakan kepada pengurus desa



A. GAMBARAN UMUM DESA

Desa Maritengngae terbentuk pada tahun 1955 sebagai bagian dari wilayah Kecamatan Suppa. Oleh karena pembangunan senantiasa menuntut perubahan, kadang-kadang perombakan, hal ini tidak terkecuali dalam struktur pemerintahan, sering dengan pertumbuhan dan perkembangan yang berjalan terus menerus, maka Desa Maritengngae dalam perkembangannya telah menjalani pemekaran sebanyak 3 (tiga) kali. Desa ini diberi nama Desa Maritengngae oleh karena wilayah Kecamatan Suppa pada mulanya hanya terdiri dari Desa yaitu : Desa Watang Suppa, Desa Maritengngae dan Desa Lero. Tahun 1960 Kecamatan Suppa di bentuk menjadi 8 Desa di antaranya: Desa Wattang Pulu, Desa Turung Lappa, Desa Watang Suppa, Desa Maritengngae, Desa Lotang Salo, Desa Mattoanging dan Desa Lero. Desa Maritengngae secara geografis berada di bagian tengah wilayah Kecamatan Suppa. Hal inilah yang mengilhami tokoh masyarakat untuk member nama "Desa Maritengngae". Tengngah dalam pengertian bahasa bugis berarti di tengah. Kata Tengngah dengan di beri awal kata Mari dan akhiran E, maka kata Maritengngae mempunyai arti "Berada di Tengah-tengah". Dengan pengertian tersebut maka Desa Maritengngae bermakna dalam melaksanakan kegiatan keseharian baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat selalu menempatkan diri dalam keseimbangan dunia dan akhirat, material dan spiritual.

1. Letak Geografis dan Batas Administratif Desa

Secara geografis Desa Maritengngae berada di wilayah Kecamatan Suppa dengan luas wilayah 697,23 Ha yang berjarak kurang lebih 3 Km dari pusat Pemerintahan Kecamatan, 16 Km dari pusat kota Kabupaten Pinrang.

Adapun batas-batas wilayah Desa Maritengngae adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Desa Polewali

- Sebelah Selatan : Desa Tasiwalie

- Sebelah Timur : Kel. Watang Suppa

- Sebelah Barat : Desa Lotang Salo

Topografi

Kondisi topografi wilayah Desa Maritengngae pada umunya adalah dataran dengan ketinggian 4 meter di atas permukaan laut. Hal ini dipengaruhi oleh letak geografis wilayah yang sebagian besar merupakan wilayah dataran yang terbentang dari posisi selatan Kabupaten Pinrang.

Iklim

Iklim Desa Maritengngae sebagaimana Desa-desa yang ada di wilayah Kabupaten Pinrang mempunyai iklim kemarau dan penghujan, di mana suhu rata-rata 27°C, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Maritengngae Kecamatan Suppa.

2. Gambaran Umum Demografis

■ Penduduk

Jumlah penduduk Desa Maritengngae terdiri atas 2028 jiwa yang tercakup dalam 628 kepala keluarga (KK) tersebar dalam 3 Dusun, dengan tingkat kepadatan 685 jiwa/dusun. Jumlah penduduk berjenis kelamin Laki-laki 902 jiwa dan Perempuan 1126 jiwa jumlah seluruhnya adalah 2.028 jiwa.

Tingkat Pendidikan

Berdasarkan Undang-undang pendidikan yang diperuntukan bagi seluruh masyarakat Indonesia dan salah satu tujuannya adalah meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan penduduk secara maksimal. Keberhasilan pembangunan suatu daerah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan penduduknya, karena meningkatnya pendidikan masyarakat berarti kualitas manusia sebagai sumber daya semakin membaik, yang pada akhirnya akan meningkatkan pula produktivitas dalam semua sektor pembangunan.

Masyarakat Desa Maritengngae kini selangkah lebih maju, yang dulunya mereka berpikir buat apa sekolah, sekolah hanya buang-buang uang saja dari pada sekolah lebih baik uangnya digunakan untuk keperluan yang lain dan para orang tua tidak berpikir akan pentingnya ilmu pendidikan. Tapi kini para orang tua telah sadar akan pentingnya ilmu pendidikan bagi anakanak mereka.

Mata Pencaharian

Secara umum mata pencaharian warga desa Maritengngae dapat teridentifikasi ke dalam bidang mata pencaharian. Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian:

Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

No.	Pekerjaan	Jumlah
1.	Petani	295
2.	Nelayan	7
3.	Pegawai Negeri Sipil	37
4.	Pegawai Swasta	22
5.	Buruh Bangunan	50

6.	Pedagang	40
7.	Tukang Batu/Kayu	35
8.	Service/Bengkel	4
9.	Penjahit	7
10.	Tukang Ojek	10
11.	Sopir	15
12.	Peternak	85
13.	Lain-lain/Tidak Tetap	485

3. Kondisi Ekonomi

a. Pertanian

Potensi sektor pertanian di Desa Maritengngae terutama tanaman pangan dengan komoditas andalan padi, jika di lihat dari segi wilayah pertanian, hanya sebagian kecil sawah yang dapat teraliri air irigasi, hal ini disebabkan karena Desa Maritengngae berada diujung saluran irigasi tehnis, sebagian lagi adalah sawah tadah hujan, mudah mudahan kedepan pemerintah Kabupaten Pinrang dapat melakukan upaya yang maksimal sehingga sector pertanian di Desa Maritengngae dapat lebih meningkatkan hasil pendapatan masyarakat petani.

b. Perkebunan

Desa Maritengngae sangat kaya dengan hasil produksi tanaman perkebunan. Jenis perkebunan yang dominan di tanam oleh petani yang memiliki nilai ekonomis penting berupa kelapa, mangga, pisang dan tanaman holtikultura terutama yang merupakan tanaman andalan masyarakat Desa Maritengngae adalah Jagung manis dimana sudah menjadi motto bagi masyarakat adalah bahwa "tiada hari tanpa panen Jagung manis" Hal tersebut disebabkan

banyaknya masyarakat yang menanam jagung manis,jika dilihat dari usia panen dari jagung manis ini memang relative cepat dan sangat cepat didalam pemasarannya,dimana pedagang yang langsung menjmput hasil panen dari petani,sehingga kamipun juga berharap agar pemerintah Kabupaten Pinrang dapat melihat potensi tersebut terutama dalam pemberian bantuan kepada masayarakat berupa CULTIVATOR,sehingga lebih mempermudah masayarakat didalam pengololaan lahan perkebunan.

c. Peternakan

Warga Desa Maritengngae selain bertani dan berkebun juga tidak sedikit yang bergerak dalam usaha peternakan terutama ternak ayam petelur dan ayam potong, disamping usaha sendiri ada juga sebagian masyarakat yang menjalin kerja sama dengan pihak ketiga dalam hal perusahaan yang bergerak dalam bidang peternakan ayam Broiler. Di samping itu juga, ternak gembala sebagai salah satu kegiatan tambahan ekonomi dalam menopang ekonomi rumah tangga warga masyarakat Desa Maritengngae, jenis hewan ternak warga Desa Maritengngae ada tiga, yaitu:

1. Jenis ternak besar : Sapi, Kerbau dan Kuda

2. Jenis ternak kecil : Kambing

3. Jenis ternak unggas : Ayam dan Itik

d. Perikanan dan kelautan

Desa Maritengngae juga memiliki potensi dalam bidang Perikanan dan Kelautan terutama dalam sector komoditi hasil tambak yaitu : udang windu dan juga ikan bandeng, disamping itu masyarakat Desa Maritengngae juga banyak bergerak dalam sector budidaya rumput laut,sector budidaya

rumput laut ini,juga banyak memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Desa Maritengngae,terutama bagi ibu ibu,dimana pada saat panen dan proses pengeringannya.

4. Visi dan Misi

a. Visi

Visi dari Desa Maritengngae adalah gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan Desa. Penyusunan visi Desa Maritengngae ini dilakukan dengan pendekatan partisifatif. melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa Maritengngae seperti pemerintah Desa, BPD, Tokoh Masyarakat, tokoh agama, lembaga masyarakat Desa pada umumnya. Pertimbangan kondisi eksternal di Desa seperti satuan kerja wilayah pembangunan di Kecamatan. Maka berda<mark>sarkan pertimbangan diat</mark>as visi Desa Maritengngae adalah "Terwujudnya masyarakat Desa Maritengngae yang maju, mandiri, berbadan sehat dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, bertumpu pada keunggulan d<mark>i b</mark>id<mark>ang perta</mark>nia<mark>n,</mark> perdagangan dan industri kecil untuk mencapai kesejahteraan masyarakat lahir dan batin berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945"

b. Misi

Selain penyusunan visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh Desa agar tercapainya visi Desa tersebut. Visi berada di atas misi kemudian pernyataan visi dijabarkan ke dalam misi agar dapat dioperasionalkan/dikerjakan. Sebagaimana visi, misi pun dalam penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif dan

pertimbangan potensi dan kebutuhan Desa Maritengngae, sebagaimana proses yang dilakukan maka misi Desa Maritengngae adalah :

- Meningkatkan produksi pertanian dan meningkatkan pengelolaan dan pemasarannya untuk mendukung pengembangan perdagangan dan industri kecil guna meningkatkan perekonomian
- Meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya desa, melalui sistem perijinan yang mudah dan cepat guna mendukung peningkatan invetasi dan penanaman modal
- 3. Meningkatkan peran koperasi, agar benar- benar mejadi guru perekonomian desa, daerah, regional dan nasional
- 4. Menjaga dan melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup
- 5. Meningkatkan sarana dan prasarana fisik serta pelayanan kesejahteraan sosial masyarakat dibidang pendidikan, kesehatan, kebudayaan, keagamaan dan olahraga utamanya prasarana fisik jalan, jembatan dan irigasi
- 6. Menciptakan pemerintahan yang baik berdasarkan demokratisasi dan penegakan hukum
- 7. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan melalui program pemberdayaan, khususnya kaum wanita
- 8. Meningkatkan stabilitas keamanan dan ketertiban agar masyarakat dan beraktifitas dengan tenang
- Menggali dan memberdayakan potensi pada desa dengan tetap memperhatikan kemampuan dan tidak menghambat perekonomian masyarakat



Wawancara dengan Kepala Desa Maritengngae





Wawancara dengan Ketua Karang Taruna



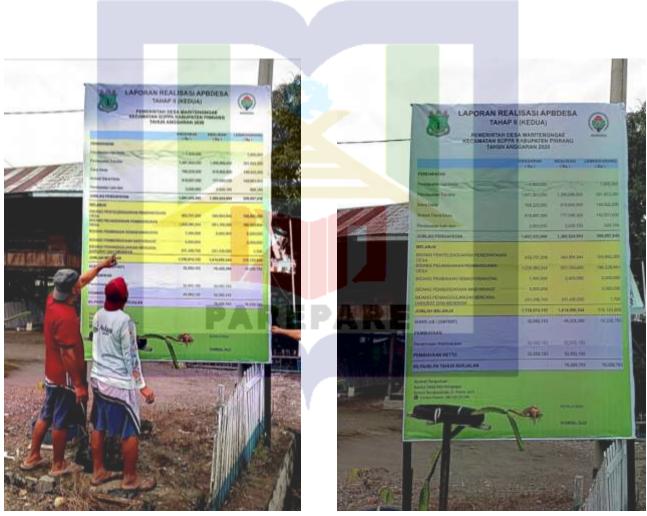
Wawancara dengan Masyarakat





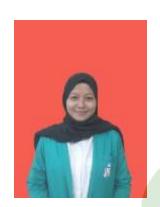


Musyawarah Rancangan APBDes



Baliho Realisasi APBDesa

BIOODATA PENULIS



Nur Asia Ali Lahir pada tanggal 22 April 1999. Di Kota Pinrang, Kecamatan Suppa. Anak pertama dari tiga bersaudara. Ayah bernama Muh. Ali dan Ibu bernama Yuhani. Adapun riwayat hidup pendidikan penulis yaitu pada tahun 2003 mulai masuk Taman Kanak-Kanak Majennang, pada tahun 2005 masuk Sekolah Dasar Negeri 168 Kec. Suppa dan pada tahun 2005 masuk Sekolah Menengah Pertama Negeri 1

Suppa dan kemudian selesai pada tahun 2014, kemudian kembali melanjutkan jenjang pendidikan Sekolah Menegah Atas Negeri (SMAN) 4 Pinrang dan selesai pada tahun 2017. Dan melanjutkan pendidikan Strata 1 di Institut Agama Islam Negeri Parepare, dengan mengambil program studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisinis Islam, sekarang ini penulis sudah sampai ke jenjang jenjang akhir penyelesaian, kemudian menyelesaikan skripsi yang berjudul: Penerapan Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan Desa Maritengngae Kabupaten Pinrang (Analisis Akuntansi Syariah)

